

ABSTRACT

The title of this research is "Evaluation of Government Policy Regarding Tourist Bus Operation Permits in Kuningan Regency". This research was conducted by Faqih Alamsyah as one of the requirements for obtaining a Bachelor of Public Administration degree at Sunan Gunung Djati State University, Bandung. This research was carried out for 3-6 months.

This research was conducted with the aim of evaluating the Tourist Bus Operation Permit, to find out the factors that cause deviations from the implementation of the Tourist Bus Operation Permit and to find out the efforts made by the government to overcome deviations from the Tourist Bus Operation Permit.

This research was conducted to determine the relationship between deviations in the implementation of Tourist Bus Operation Permits and William N. Dunn's theory of public policy with its 6 criteria: effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness and accuracy

The research design used is qualitative research with descriptive methods. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. The research data analysis technique in this study uses qualitative data analysis which consists of three stages: data reduction, data presentation, drawing conclusions.

Based on the research carried out, it can be concluded that the tourism bus operating permit policy is not working optimally because there are still obstacles in the field, namely there are deviations from Tourist Buses which are used regularly, and Regular Buses providing deviant services that do not comply with the provisions. These include: (1) Bus Luragung (Buah Lestari) E 7687 Kb, (2) Po Mikka Tiara Lengkong Livery Bussid Shd Ori, (3) Bus Luragung B 7215 Yg (Rengganis Kreo/Bus Lestari), (4) Rengganis Kreo, (5) Tunggal Jaya Bus, (6) Angga Saputra Bus, (7) Ctv, (8) 021 Trans, (9) Rafael. The government's efforts to prevent violations of operating permits for tourist buses in Kuningan Regency: 1) Providing written warnings to tourist bus entrepreneurs not to commit violations, 2) Tourist bus entrepreneurs who commit violations or deviations are asked to change their permits from tourist buses to regular buses, 3) Kuningan Regency Transportation Service to coordinate with the head of the BPTD to carry out joint operations with a copy of the letter to the Director General of Land Transportation, 4) Revoking the operating permit of tourist buses that commit irregularities if the tourist bus entrepreneur still commits violations.

Keywords: Policy, Operation Permit, Tourist Bus

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi izin operasi Bus Judul Penelitian ini adalah “Evaluasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Izin Operasi Bus Pariwisata Di Kabupaten Kuningan”. Penelitian ini dilakukan oleh Faqih Alamsyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarja Administrasi Publik di Universitas Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Waktu penelitian ini dilakukan selama 3-6 bulan.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi Izin Operasi Bus Pariwisata, untuk mengetahui faktor – faktor terjadinya penyimpangan dari pelaksanaan Izin Operasi Bus Pariwisata dan mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi penyimpangan Izin Operasi Bus Pariwisata.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara penyimpangan pelaksanaan Izin Operasi Bus Pariwisata dengan teori kebijakan publik dari Wiliam N. Dunn dengan 6 keriterianya : efektivitas,efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitiann dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang terdiri dari tiga tahap: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan Dari 6 Dimensi Evaluasi Kebijakan yaitu : Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Ketepatan, Responsivitas. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah terhadap Izin Operasi Bus Pariwisata masih belum optimal dikarenakan adanya penyimpangan Bus Pariwisata yang di gunakan secara Reguler, dan Bus Reguler memberikan pelayanan yang menyimpang tidak sesuai ketentuan. Diantaranya : (1) Bus Luragung (Buah Lestari) E 7687 Kb, (2)Po Mikka Tiara Lengkong Livery Bussid Shd Ori, (3) Bus Luragung B 7215 Yg (Rengganis Kreo/ Bus Lestari), (4) Rengganis Kreo, (5) Bus Tunggal Jaya, (6) Bus Angga Saputra, (7) Ctv, (8) 021 Trans, (9) Rafael. Upaya pemerintah terhadap penyimpangan izin operasi pada bus pariwisata di Kabupaten Kuningan: 1)Pemberian peringan secara tertulis kepada pengusaha bus pariwisata untuk tidak melakukan pelanggaran, 2) Diminta pengusaha bus pariwisata yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan untuk melakukan perubahan perizinan dari bus pariwisata menjadi bus reguler, 3) Dinas perhubungan Kabupaten Kuningan untuk berkoordinasi kepada kepala bptd untuk melakukan operasi gabungan dengan tembusan surat kepada dirjen perhubungan darat, 4) Melakukan pencabutan izin operasi bus pariwisata yang melakukan penyimpangan bilamana pengusaha bus pariwisata masih melakukan pelanggaran.

Kata Kunci : Kebijakan, Izin Operasi, Bus Pariwisata